

---

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

Rita<sup>1)</sup>, Erman Sutandar<sup>2)</sup>, Zulfadli<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

<sup>2</sup>Prodi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

<sup>3</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Univ. Maritim Raja Ali Haji

Correspondence Author: Rita, ritasatriajuqra@gmail.com, Jakarta, Indonesia

### Abstract

In terms of preparation of Regional Financial Reports, the Regional Government in addition to having an accounting policy as the basis for preparing financial reports, local governments must also have human resources capable of compiling regional financial reports in accordance with Government Regulation Number 24 of 2005 concerning Government Accounting Standards and Ministerial Regulations in Negeri Number 13 of 2006. This research will take the case of the factors that influence the understanding of SKPD and treasurer tools of Government Accounting Standards (SAP) in the preparation of regional financial statements. Based on the research data that has been collected, data on the demographics of research respondents are obtained, consisting of: (1) Educational Background, (2) Education Level, and (5) How many times have attended training on regional financial reporting. There is a positive relationship (correlation) between the dependent variable which shows that the variable has a unidirectional effect. Educational background, education level and training have a significant effect on the understanding of Government Accounting Standards in Regional Financial Reporting, and this is in line with the research hypothesis.

**Keywords:** Government Accounting Standards, Financial Statements

### Abstrak

Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah disamping harus memiliki kebijakan akuntansi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM yang mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. penelitian ini akan diambil kasus faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman perangkat SKPD dan bendaharawan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data tentang demografi responden penelitian yang terdiri dari: (1) Latar Belakang Pendidikan, (2) Tingkat Pendidikan, dan (5) berapa kali mengikuti diklat tentang penyusunan

laporan keuangan daerah. Terdapat hubungan (korelasi) positif antara variable dependen yang menunjukkan variable tersebut berpengaruh searah. Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dan hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian.

**Kata Kunci :** Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan

## A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah dalam bidang fiskal yang esensinya adalah distribusi sumber daya keuangan sebagai implikasi dari distribusi kewenangan. Tujuan pokok Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, antara lain memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah serta menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab, dalam mewujudkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dan menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang tersebut di atas khususnya mengenai keuangan daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 265 ayat (1) menyatakan bahwa setiap SKPD wajib menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca SKPD; c. Catatan atas laporan keuangan SKPD dan berdasarkan pasal 290 ayat (1), (2) dan (3) yang intinya menyatakan bahwa Kepala

SKPD harus menyampaikan laporan realisasi anggaran sebanyak 2 kali setahun yakni semester pertama (Januari s.d Juni) yang menerangkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja SKPD disertai dengan prognosis untuk enam bulan berikutnya paling lama tujuh hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya Kepala SKPD menyampaikan laporan tahunan yang dimulai dari periode Januari s.d Desember tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah disamping harus memiliki kebijakan akuntansi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM yang mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Roesyanto (2007 : 3), menyatakan bahwa "rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan

satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah bertujuan sebagai acuan bagi:

1. penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya;
2. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar
3. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan
4. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan supaya hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Selain pemahaman terhadap SAP.

Sebelum dilakukan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, perangkat SKPD harus memahami standar akuntansi pemerintahan yang berisikan penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa serta laporan keuangan konsolidasi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kausal (causal), yaitu untuk melihat

hubungan beberapa variabel yang belum pasti, Umar (2008) menyebutkan desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan antara pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan sebagai variabel independen dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur pimpinan SKPD dan Bendaharawan dengan jumlah 36 SKPD, sehingga total populasi berjumlah sebanyak 72 populasi. Seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Tabel Populasi

No	Keterangan	Populasi		Sampe l
		Kepala SKPD	Bendaha rawan	
1	Dinas	15	15	30
2	Biro	9	9	18
3	Badan	12	12	24
Jumlah		36	36	72

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Survey, yakni metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari sumber asli. Dengan teknik yaitu teknik pengumpulan data menggunakan instrumen kuisisioner. Langkah-langkah pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner dikirim kepada seluruh responden,

2. Setelah 10 hari, peneliti mengumpulkan kuisisioner yang telah diisi responden,
3. Jika ada responden yang belum mengembalikan kuisisioner tersebut, maka kepada mereka diberi waktu 10 hari lagi,
4. Setelah batas waktu yang telah ditetapkan dan kuisisioner telah dikembalikan oleh responden, maka dilakukan pengujian statistik lebih lanjut dengan kedua data responden dan dilakukan uji response bias karena ada perbedaan waktu dalam pengumpulan data

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda. Untuk keabsahan hasil analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan software SPSS (Statistical Package for Sosial Sciense) versi 15.0. Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

keterangan :

Y = Pemahaman dalam Penyusunan laporan keuangan daerah

X<sub>1</sub> = Latar Belakang Pendidikan

X<sub>2</sub> = Jenjang pendidikan

X<sub>3</sub> = Pelatihan

a = konstanta

b<sub>1</sub> = koefisien regresi latar belakang pendidikan

b<sub>2</sub> = koefisien regresi jenjang pendidikan

b<sub>3</sub> = koefisien regresi pelatihan

e = tingkat kesalahan pengganggu

Lokasi penelitian yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dibatasi pada pejabat yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan Daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan bendaharawan Satuan Kerja Pemerintah Daerah tersebut.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuisisioner yang disebar kepada responden adalah sebanyak 72 kuisisioner dan dilakukan satu tahap. Kemudian sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan, kuisisioner dijemput kembali. Dari 72 kuisisioner yang dikirim/dibagikan yang kembali sebanyak 61 dan yang cacat sebanyak 1 Jadi kuisisioner yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data hanya sebanyak 60 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Kuisisioner

No	Keterangan	Jumlah				
		Instansi	Sebaran	Kembali Baik	Rusak	tidak kembali
1	Dinas	15	30	22	1	6
2	Biro	9	18	22	-	1
3	Badan	12	24	15	-	4
Jumlah		36	72	60	1	11

### Karakteristik Penelitian

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data tentang demografi responden penelitian yang terdiri dari: (1) Latar Belakang Pendidikan, (2) Tingkat Pendidikan, dan (3) berapa kali mengikuti diklat tentang penyusunan laporan keuangan daerah. Tabel 3 sampai 5 menyajikan ringkasan demografi responden.

Tabel 3.

Latar Belakang Pendidikan Responden

No	Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Akuntansi	35	58,3 %
2	Bukan Akuntansi	25	31,7 %
Total		60	100 %

Latar Belakang pendidikan responden relatif tinggi, hal ini dapat dilihat bahwa hanya 35 orang atau 58,3 % dari responden mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi sementara yang bukan dari jurusan akuntansi sebanyak 25 orang atau 31,7 %,

Tabel 4. Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMA	0	0 %
2	D3	7	11,7%
2	S1	33	55%
3	S2 / S3	20	33,3%
Total		60	100 %

Hasil penelitian berdasarkan jenjang pendidikan responden relatif tinggi, hal ini dapat dilihat bahwa hanya 7 orang atau 11,6 % dari responden mempunyai tingkat pendidikan di bawah S1, sedangkan tingkat pendidikan S1 sebanyak 33 orang atau 55 %, dan 20 orang atau 33,3% dari responden memiliki jenjang pendidikan S2/S3.

Tabel 5. Frekwensi Pelatihan selama 4 Tahun Terakhir

No	Jumlah Pelatihan	Frekuensi	Persentase
1	Satu Kali	30	50 %
2	Dua Kali	15	25 %
3	Tiga Kali	7	11,6 %
4	Empat Kali	8	13,4 %
Total		60	100 %

Dari 60 orang responden diketahui bahwa sebagian besar telah mengikuti pelatihan yang tinggi yaitu 30 orang atau 50 % selama satu kali dalam empat tahun terakhir, 15 orang atau 25 % yang telah mengikuti pelatihan dalam dua kali dalam empat tahun terakhir, 7 orang atau 11,6 % yang telah mengikuti pelatihan selama tiga kali dalam empat tahun terakhir dan 8 orang atau 13,4 % yang telah mengikuti pelatihan selama empat kali dalam empat tahun terakhir.

### Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dengan menggunakan software statistik, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ( $r$  hitung  $>$   $r$  tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa  $r$  hitung lebih besar  $r$  tabel, dimana nilai  $r$  tabel untuk sampel sebanyak 60 adalah 0,208, sebagaimana dapat digambarkan pada tabel 6

Tabel 6. Uji Validitas Variabel

Variabel	Butir Instrumen	R tabel	Ket
Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah(Y)	a. Pema 1	0,208	Valid
	b. Pema 2	0,208	Valid
	c. Pema 3	0,208	Valid
	d. Pema 4	0,208	Valid
	e. Pema 5	0,208	Valid

### Uji Reliabilitas

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan *alpha cronbach's* lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrumen tersebut reliabel. Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Secara umum suatu instrumen dikatakan bagus jika memiliki koefisien *Cronbach's alpha*  $>$  0,6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel.

Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Alpha Cronbach's	Batas Reliabilitas	Keterangan
(Y)	0,992	0,6	Reliabel



### Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan dengan melihat uji grafik, maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal. Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,346 untuk. Jika signifikansi nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0.05, disini semua variabel maka dapat dinyatakan bahwa data mempunyai distribusi normal. signifikansi nilai Kolmogorov Smirnov lebih dari 0,05. Hal ini juga didukung dengan tabel dimana data mengikuti garis diagonal. Uji normalitas dapat dilihat pada pada gambar berikut ini.

Tabel 8. Pengujian Normalitas Data  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		PEMA
N		60
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	3.4713
	Std. Deviation	.69949
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.115
	Negative	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		1.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.163
a. Test distribution is Normal.		

### Uji Linearitas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variable mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Menurut Priyatno, uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Untuk menguji linearitas dengan SPSS, kita dapat menggunakan test

of linierity dengan taraf 0.05. Dua variable dikatakan mempunyai hubungan yang linier jika signifikasinya kurang dari 0.05.

### Pengujian Signifikan Simultan (Uji-f)

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Bentuk pengujiannya :

$H_0 : b_1 = b_2 = 0$ , artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : b_1, b_2 \neq 0$ , artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika probabilitas  $< 0.10$ , maka  $H_a$  diterima

Jika probabilitas  $> 0.10$ , maka  $H_a$  ditolak

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan dan Pelatihan terhadap pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka model penelitian adalah sebagai berikut:

Pemahaman =  $0.054 + 0.290$  Latar +  $0.141$  Jenjang +  $0.817$  Pela + e

Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan dan Pelatihan menunjukkan angka positif. Berarti bahwa hubungan antara variabel Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan dan Pelatihan dengan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah adalah positif yaitu Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan dan Pelatihan maka semakin tinggi Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah

### Pengujian Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan

seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Bentuk pengujiannya adalah :

$H_0 : b_1 = 0$ , artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : b_1 \neq 0$ , artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika probabilitas  $< 0.10$ , maka  $H_a$  diterima

Jika probabilitas  $> 0.10$ , maka  $H_a$  ditolak

Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap kinerja manajerial, maka dapat dilihat dari nilai signifikansi t hitung tersebut. Jika nilai signifikansi dari t hitung tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh variabel tersebut terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil pengujian data, maka dapat dinyatakan bahwa variabel Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

### Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Pengujian koefisien determinan ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur proporsi atau

persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen (Ghozali, 2005 : 83). Selanjutnya, Ghozali (2005 : 83) menerangkan bahwa koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hal ini berarti bila  $R^2=0$  menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila  $R^2$  semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila  $R^2$  semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi berganda, maka langkah selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis yang akan diuji adalah Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9  
Ringkasan Pengujian Hipotesis 1

a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,054	,344		,157	,876		
	LATAR	,290	,111	,284	2,621	,012	,580	1,725
	JENJANG	,141	,130	,120	1,077	,286	,551	1,814
	PELA	,817	,128	,690	6,376	,000	,579	1,726

a. Dependent Variable: PEMA

R = 0,809

Adjusted  $R^2$  = 0,633

F = 32.102

Sig. F = 0,000

Nilai R pada intinya untuk mengukur seberapa besar hubungan antara independen variabel dengan dependen variabel. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai R sebesar 0,809, hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kinerja manajerial. Sedangkan nilai R square ( $R^2$ ) atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum  $R^2$  untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi.

Jika independen variabel lebih dari satu, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, nilai yang digunakan adalah nilai adjusted  $R^2$ . Nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,633 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 63,3%. Dengan kata lain 63,3 % perubahan dalam Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan mampu dijelaskan variabel Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan dan Pelatihan sisanya sebesar 36,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

#### D. PENUTUP

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.. Berdasarkan hasil analisis data

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan (korelasi) positif antara variabel dependen yang menunjukkan variabel tersebut berpengaruh searah.
2. Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dan hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian.

Hasil penelitian ini minimal dapat memotivasi penelitian dimasa yang akan datang, untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kinerja organisasi, karena penelitian ini masih sedikit. Dengan mempertimbangkan pada keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan-keterbatasan yang ada antara lain:

1. Menambah responden,
2. Seperti disebutkan dalam keterbatasan penelitian diatas, penelitian ini hanya memasukkan tiga variabel penelitian yang mempengaruhi Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah maka penelitian yang akan datang diharapkan memasukkan variabel lain yang diduga besar pengaruhnya terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan dan Marwan Asri. Anggaran Perusahaan. Edisi Revisi
- Anthony, Robert N. John Dearden dan Norton M. Bedford.1992. Management Control System. Edisi Ke Lima, Terjemahan Agus Maulana, Erlangga, Jakarta



- 
- Hartanto D. 1991 Akuntansi Untuk Usahawan. Edisi Ke Delapan, LPFE UI, Jakarta, 1999
- Helmkamp. John G. 1991. Managerial Accounting 2 nd Edition, New York, John Wiley and Sons
- Ihyaual Ulum MD. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada, Jakarta
- Mardiasmo. 2009 Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta
- Munandar. 2001. Budgeting ; Perencanaan, Pengkoordinasian dan Pengawasan Kerja Pertama Edisi Pertama Cetakan keempatbelas Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Edisi Ke Dua, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta, 2001
- Sumarni. Murti dan John Soeprihanto. 1991 .Pengantar Bisnis Modern (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan). Edisi Ke Tiga, Liberty, Yogyakarta
- Swastha, Basu DH. Ibnu Sukotjo W. 1991. Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern). Liberty, Yogyakarta
- Usry Milton F, Lawrence H.Hammer. 1999 Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian, Jilid Satu Edisi Sepuluh, Cetakan Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta